

Edisi: Januari 2026



Elektrifikasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kadin Dorong Pertumbuhan Hijau dan
Peran Dunia Usaha dalam Proses
Aksesi OECD Indonesia

BritCham Indonesia dan Kadin
Indonesia Memimpin Dialog Investasi
Inggris Raya - Indonesia di London
Untuk Mendukung Implementasi
Economic Growth Partnership

Global & Domestic Economic Outlook
2026: Kadin Tekankan Pro-Growth,
Pro-Poor, Pro-Job hingga Pro-
Environment

Kadin Sharia Economic Outlook 2026:
Memperkuat Industri Halal Berdaya
Saing Global

Kata Pengantar

Mengubah Dialog di Davos Menjadi Aksi Nyata



Di tengah dunia yang kian terfragmentasi oleh ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, dan ketidakpastian transisi teknologi serta energi, kehadiran Indonesia di World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss, 19-23 Januari 2026, membawa makna yang jauh melampaui seremoni diplomasi. Indonesia datang dengan satu pesan utama: kami hadir sebagai satu ekosistem bisnis: siap bekerja, membangun kepercayaan, dan mengeksekusi kemitraan. Kehadiran Kadin bersama Danantara Indonesia, dan BKPM adalah penegasan bahwa Indonesia tidak sekadar menawarkan potensi, tetapi kesiapan.

WEF ke-56 di Davos tahun ini mempertemukan hampir 3.000 pemimpin dari sekitar 130 negara termasuk puluhan kepala negara dan ribuan CEO dengan komposisi yang semakin mencerminkan kebangkitan Global South. Fakta bahwa kawasan ini menyumbang lebih dari 40% output global, hampir separuh perdagangan internasional, serta mayoritas arus investasi langsung asing, menjadikan Davos panggung strategis bagi dunia usaha Indonesia. Di sinilah peluang berjejaring bertemu dengan kebutuhan untuk bergerak cepat dan terukur. Dalam orkestrasi nasional itu, masing-masing peran menjadi jelas. BKPM memastikan pintu investasi terbuka dengan proses yang makin transparan dan terukur. Danantara memperkuat kapasitas pengelolaan investasi dan aset untuk mendorong proyek strategis yang kompetitif. Kadin, sebagai jembatan dunia usaha, menerjemahkan prioritas nasional menjadi peluang bisnis konkret menghubungkan perusahaan Indonesia, BUMN, investor, dan mitra global serta memastikan setiap pertemuan berujung pada rencana tindak lanjut.

Tema WEF 2026, “The Spirit of Dialogue,” sejalan dengan pilihan Indonesia. Ketika dunia cenderung mengeras, Indonesia memilih dialog yang solutif: dialog yang berorientasi hasil.

Dari perspektif dunia usaha, dialog harus berakhir pada kerja sama yang bisa dieksekusi. Kepastian berusaha, kemitraan berbasis hasil, dan ekosistem investasi yang kompetitif adalah prasyarat agar perusahaan dapat tumbuh, berinovasi, dan memperluas pasar. Kolaborasi yang kami dorong bukan hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing dan ketahanan Indonesia dalam jangka panjang.

Bagi pengusaha, WEF adalah ruang akselerasi. Ekspansi global tidak cukup dengan promosi. Ia membutuhkan mitra yang tepat. Untuk produktivitas, pembiayaan, dan akses pasar agar perusahaan Indonesia masuk lebih dalam ke rantai pasok global. Karena itu, peluang di Davos akan optimal jika perusahaan hadir dengan penawaran yang jelas, model bisnis yang kuat, kebutuhan kemitraan yang spesifik, serta rencana tindak lanjut yang terukur.

Dengan jejaring 15.801 anggota di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, didukung ribuan pengurus, Kadin memastikan momentum Davos mengalir hingga tingkat nasional dan subnasional. Fokus kami pada 2026 yaitu ekonomi hijau, transisi energi, dan investasi berbasis penciptaan lapangan kerja diterjemahkan melalui inisiatif nyata: Kadin Net Zero Hub, kolaborasi Indonesia Transition Factbook bersama BloombergNEF, serta Indonesia Jobs and Skills Accelerator bersama WEF. Semua dirancang agar percakapan global berujung pada investasi, proyek, dan green jobs di tanah air.

Dalam kerangka “Indonesia Incorporated,” Kadin berperan sebagai penghubung dan orkestrator. Kolaborasi lintas swasta nasional, BUMN, dan mitra internasional hanya efektif jika peran jelas, kepentingan selaras, dan struktur kerja sama operasional. Karena itu, kami mengkurasi pertemuan dialog CEO, business matching sektoral, hingga forum bisnis agar kolaborasi bergerak dari kesepahaman menuju kemitraan yang berkelanjutan.

Empat sesi utama di Indonesia Pavilion mulai dari strategi iklim, renaisans digital, transisi energi yang adil, hingga dekarbonisasi ekstraksi kami rancang sebagai pintu masuk kolaborasi. Bukan sekadar berbagi perspektif, melainkan mengundang para pemangku kepentingan untuk duduk bersama, menyelaraskan kebutuhan, dan menjajaki proyek yang siap ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, kehadiran Indonesia di Davos adalah tentang mengubah dialog menjadi aksi. Dengan kebijakan yang siap, investasi yang terkelola, dan pelaku usaha yang terhubung, Indonesia datang bukan untuk berbicara panjang, melainkan untuk bekerja bersama. Di tengah dunia yang mencari jangkar kepercayaan, Indonesia menawarkan satu hal yang paling dibutuhkan: kemitraan yang nyata, terukur, dan berorientasi masa depan.

Ketua Umum Kadin Indonesia
Anindya Novyan Bakrie

DAFTAR ISI

Kadin di Davos 2026: Elektrifikasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	6
Kadin Dorong Pertumbuhan Hijau dan Peran Dunia Usaha dalam Proses Akses OECD Indonesia	9
BritCham Indonesia dan Kadin Indonesia Memimpin Dialog Investasi UK-Indonesia di London dalam Rangka Mendukung Implementasi Economic Growth Partnership	13
Economic Outlook 2026: Kadin Tekankan Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job hingga Pro-Environment	16
Kadin: Program MBG Berpotensi Tambah Pertumbuhan PDB hingga 3,5 Persen	23
SPPG MBG Gotong Royong Kadin Hadir di Deli Serdang, Siap Layani Ribuan Penerima Manfaat	25
Kadin Sharia Economic Outlook 2026: Memperkuat Industri Halal Berdaya Saing Global	27
Ekosistem Syariah Terbentuk, Tapi Tidak Terorkestrasi	31
"Mood" Pengusaha Positif, Kadin Optimistis Investasi 2026 Bisa Menguat	34
Road to JFSS 2026: Pemerintah dan Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas	37
Survei Perdana Kadin Business Pulse: Sentimen Positif Pelaku Bisnis Lebih Dominan di Kuartal IV 2025	41
Temui Mendag, Ketum Kadin Dorong ABAC Jadi Momentum Ekspansi Perdagangan	44

DAFTAR ISI

Dorong Investasi, Perdagangan, dan Ketahanan Ekonomi Nasional, Kadin Siapkan Empat Agenda Strategis Awal Tahun	45
Kadin Indonesia Institute Gelar Executive Brief Tingkatkan Kinerja Perusahaan Tahun 2026	46
Anindya Bakrie: Kerja Sama Indonesia-India Berpeluang Lipatgandakan Nilai Perdagangan	50
Musprov V Kadin Provinsi Kepri Tetapkan Nur Mustava sebagai Ketua Umum Periode 2026-2031	52
Kadin Kalteng Gelar Rapimprov 2025, Luncurkan Program Mahasiswa Entrepreneur MATANG	53
Kadin Aceh Bersama Kadin Indonesia dan CSM Malaysia Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir dan Longsor	55
Kadin Jatim Dorong Revisi UU Kadin demi Penguatan Organisasi hingga ke Daerah	57
Perkuat Sinergi Global, Kadin Provinsi Bali Terima Kunjungan Mahasiswa Hong Kong Polytechnic University	59
“Kadin Kalsel Peduli” Salurkan Donasi untuk Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar	61
Kadin Hadirkan Hunian Layak bagi Penyintas, Huntap Pertama Pascabanjir Bandang di Sumbar Resmi Dibangun	63



HEADLINE

KADIN DI DAVOS 2026: ELEKTRIFIKASI JADI KUNCI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menjadi pembicara dalam salah satu diskusi panel World Economic Forum (WEF) 2026 bertajuk "Rise of Electro States" di Davos, Swis, Kamis (22/01/2026).

Davos, Swis – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa elektrifikasi merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam diskusi panel bertajuk "Rise of Electro States" di salah satu diskusi panel World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swis, Kamis (22/01/2026) siang waktu setempat.

"Bagi Indonesia, elektrifikasi benar-benar menjadi kunci bagi pertumbuhan, inovasi industri, dan juga kesejahteraan masyarakat," ujar Anin.

Anin menjelaskan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 285 juta jiwa yang mayoritas berusia muda dan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen selama tiga dekade terakhir, elektrifikasi menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional.

"Saat ini, kapasitas listrik terpasang di Indonesia telah mencapai sekitar 100 gigawatt, dengan tingkat konektivitas jaringan listrik mencapai 99 persen di 17.000 pulau," terang Anin.

Namun demikian, lanjut Anin, tantangan masih tersisa. Anin mengungkapkan bahwa sekitar 1 persen wilayah, yang mencakup kurang lebih 10.000 desa dan satu juta rumah tangga, belum sepenuhnya menikmati akses listrik yang andal.

“Kendala (penyediaan) jaringan menjadi isu krusial, seiring upaya Indonesia untuk meningkatkan kapasitas listrik sekaligus memastikan kualitas layanan bagi masyarakat,” ungkap Anin.

Di sisi lain, tantangan tersebut juga menghadirkan peluang besar. Anin menilai bahwa Indonesia memiliki keunggulan strategis, baik dari sisi demografi maupun sumber daya alam. Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, serta memiliki cadangan tembaga dan silika yang signifikan.

“Hal ini mendukung agenda hilirisasi industri dan upaya menjaga keterjangkauan energi, mengingat meski menjadi (negara) ekonomi ke-16 terbesar dunia, pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran 5.000 dolar AS,” jelas Anin.

Anin menekankan bahwa Indonesia tidak dapat berjalan sendiri, terutama dalam hal teknologi dan pengembangan talenta.

“Indonesia adalah negara non-blok dan non-aligned (tidak berpihak), sehingga kami dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Namun kolaborasi tersebut harus saling menguntungkan dan tidak menimbulkan ketergantungan,” ujar Anin.

Dalam diskusi itu Anin juga menyoroti konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah sebagai faktor kunci. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah menetapkan rencana penambahan 75 gigawatt kapasitas listrik baru dalam 15 tahun ke depan, dengan 75 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan.

Menurut Anin, hal ini menarik mengingat Indonesia juga masih menjadi produsen energi fosil, seperti batu bara serta minyak dan gas.

“Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, pendekatan elektrifikasi konvensional dinilai tidak selalu efektif. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya dan angin, khususnya di wilayah timur Indonesia, menjadi solusi yang semakin relevan,” ujarnya.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan pentingnya elektrifikasi yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam diskusi panel World Economic Forum (WEF) 2026 bertajuk “Rise of Electro States” di Davos, Swis, Kamis (22/01/2026).

Anin juga menegaskan pentingnya kemitraan yang kuat dan terstruktur antara pemerintah dan sektor swasta, mengingat sekitar 65 persen dari ekonomi Indonesia, senilai 1,5 triliun dolar AS, digerakkan oleh sektor swasta.

Selain sisi pasokan, Anin juga menekankan perlunya mendorong penggunaan teknologi listrik, terutama di sektor transportasi, industri, dan digitalisasi. Elektrifikasi transportasi publik, seperti bus dan truk, dinilai menjadi langkah awal yang efektif untuk membiasakan masyarakat terhadap manfaat kendaraan listrik, mulai dari pengurangan emisi, kebisingan, hingga efisiensi operasional.

Saat ini kata Anin, sekitar 14 persen kendaraan baru di Indonesia telah menggunakan teknologi listrik, dan angka tersebut diproyeksikan terus meningkat. Indonesia juga berambisi menjadi bagian penting dari rantai pasok global kendaraan listrik, baik di pasar Timur maupun Barat, dengan Eropa dipandang sebagai mitra strategis.

“Bagi 285 juta rakyat Indonesia, elektrifikasi bukan sekadar isu energi. Ini menyangkut keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Anin.

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi panel tersebut yaitu Presiden dan CEO Vestas Henrik Andersen, Chief Executive Officer and Chair of the Board TenneT (Belanda) Manon van Beek, Group Chief Executive Officer Eskom Holdings (Afrika Selatan).



Kadin Dorong Pertumbuhan Hijau dan Peran Dunia Usaha dalam Proses Akses OECD Indonesia

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat menyampaikan keynote remarks pada acara Kadin Indonesia x Growth Gateway Roundtable yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/01/2026).

London, Inggris – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa pertumbuhan hijau menjadi elemen krusial dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat memberikan keynote remarks pada acara Kadin Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia's Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Accession Powered by Indonesia Incorporated yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/01/2026) sore waktu setempat.

Anin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu mengintegrasikan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Anin menilai Indonesia telah bergerak dari tahap niat menuju tahap implementasi nyata dalam proses akses ke OECD.

“Selama satu tahun terakhir, Indonesia telah berpindah dari tahap niat ke tahap pelaksanaan. Akses OECD kini merupakan program implementatif dan dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton. Proses ini akan sangat relevan bagi komunitas bisnis Indonesia,” ujar Anin.

Menurut Anin, Indonesia kini memasuki fase penentuan dalam transformasi ekonomi nasional melalui akses OECD. Akses tersebut menjadi jalur praktis untuk memperkuat kredibilitas kebijakan, meningkatkan daya saing, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif melalui penyelarasan dengan standar internasional.

Terkait peran Kadin, Anin menjelaskan bahwa Kadin tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi dunia usaha, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong implementasi kebijakan. Pertama, Kadin dapat menjadi penghubung terorganisasi antara kementerian, sekretariat, dan pelaku industri untuk menghimpun masukan sektoral secara terpadu serta mencegah fragmentasi pesan.

Terkait peran Kadin, Anin menjelaskan bahwa Kadin tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi dunia usaha, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong implementasi kebijakan. Pertama, Kadin dapat menjadi penghubung terorganisasi antara kementerian, sekretariat, dan pelaku industri untuk menghimpun masukan sektoral secara terpadu serta mencegah fragmentasi pesan.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri) berfoto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartoto (lima dari kiri), Utusan Khusus Presiden Untuk Bidang Iklim dan Energi yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo (lima dari kanan), dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W. Kamdani (tiga dari kanan) di acara Official Kick Off di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/01/2026). Roundtable yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/01/2026).

Kedua, lanjut Anin, Kadin dapat mengoperasionalkan keterlibatan sektor swasta melalui pembentukan private sector OECD accession working group lintas sektor, dengan titik fokus utama dan klaster sektor yang selaras dengan domain OECD, seperti investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan lingkungan.

“Ketiga, Kadin mendukung tahap akhir implementasi reformasi melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas perusahaan, termasuk rantai pasok dan UMKM, guna mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan sejak dini serta mendorong adopsi sukarela praktik tata kelola dan bisnis yang bertanggung jawab guna membangun kepercayaan pasar,” terang Anin.

Lebih lanjut Anin juga menyinggung kemitraan ekonomi Inggris-Indonesia yang nilainya memiliki potensi besar. Nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai 3,9 miliar dolar AS hingga akhir kuartal II 2025, tumbuh 12,2 persen secara tahunan. Namun demikian, Indonesia masih berada di posisi ke-54 sebagai mitra dagang Inggris.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut Presiden RI Prabowo Subianto saat Business and Investment Forum, di London, Inggris (20/1/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (kanan) menyambut Presiden RI Prabowo Subianto (dua dari kiri) saat acara Business and Investment Forum, di London, Inggris (20/1/2026).



Presiden RI Prabowo Subianto berfoto bersama jajaran delegasi Indonesia di sela-sela acara Business and Investment Forum, di London, Inggris (20/1/2026).

“Sebagai komunitas bisnis, kami melihat ruang yang sangat besar untuk peningkatan. Dengan kerangka komersial yang jelas, kemitraan ini dapat berkembang jauh melampaui capaian saat ini,” kata Anin.

Ikut memberikan sambutan pada kesempatan tersebut, Utusan Khusus Presiden Untuk Bidang Iklim dan Energi yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia sangat besar, sehingga memerlukan dukungan yang besar untuk mampu tumbuh lebih tinggi, salah satu upaya yang sangat strategis adalah melalui akses Indonesia ke OECD.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses akses Indonesia ke OECD sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

“Akses OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menko Airlangga dikutip dari laman resmi www.ekon.go.id.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti pentingnya pembiayaan inovatif, termasuk blended finance (pendekatan yang menggabungkan pendanaan dari anggaran pemerintah dengan pembiayaan swasta), serta pengembangan green jobs sebagai bagian dari agenda transisi hijau Indonesia.

“Penciptaan lapangan kerja hijau merupakan aspek yang sangat penting, seiring upaya Indonesia menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kami juga terlibat dalam program ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas di sektor green jobs, bahkan bekerja sama dengan serikat pekerja,” ujar Shinta.

Sebagai rangkaian penutup kegiatan, turut diselenggarakan Welcome Dinner bersama Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Secretary of State for Business and Trade, H.E. Peter Kyle.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan beberapa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), antara lain MoU Growth Partnership serta MoU antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, sebagai wujud penguatan kerja sama strategis kedua negara.

BritCham Indonesia dan Kadin Indonesia Memimpin Dialog Investasi UK-Indonesia di London dalam Rangka Mendukung Implementasi Economic Growth Partnership



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (empat dari kiri) usai menandatangani naskah MoU Kadin Indonesia dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan pemerintah Inggris, disaksikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Utusan Khusus Presiden Untuk Bidang Iklim dan Energi yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/01/2026).

London, 20 Januari 2026 — British Chamber of Commerce (BritCham) Indonesia bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menegaskan perannya dalam memperkuat keterlibatan dunia usaha Inggris-Indonesia melalui penyelenggaraan UK-Indonesia Business Investment Forum di London. Forum ini menjadi wadah dialog antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam mendukung implementasi UK-Indonesia Strategic Partnership (SP) dan Economic Growth Partnership (EGP).

Forum yang diselenggarakan pada 20 Januari 2026 di Lancaster House tersebut dipimpin oleh Donny Donosepoetro OBE, Ketua Dewan Penasehat BritCham Indonesia, dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan anggota BritCham Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy, mencerminkan pentingnya peran sektor swasta dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral.

Forum ini mempertemukan perusahaan-perusahaan anggota BritCham Indonesia, antara lain Standard Chartered, HSBC, bp, Babcock, Airbus, Mott MacDonald, Arup, dan GE Vernova, serta perwakilan dari Ellips, Thales UK, dan BAE Systems. Partisipasi tersebut merefleksikan keterlibatan lintas sektor, termasuk energi dan ketenagalistrikan, energi terbarukan, kedirgantaraan dan pertahanan, infrastruktur, serta manufaktur berteknologi tinggi.

Dari sisi Indonesia, komunitas bisnis diwakili oleh Kadin Indonesia bersama sejumlah perusahaan nasional terkemuka, di antaranya Danantara, Bumi Resources, Medco, Emtek, APINDO, Lippo Group, Sampoerna, Djarum, dan Sinarmas, yang menunjukkan kuatnya keterlibatan sektor swasta dari kedua negara.

Presiden Prabowo, yang didampingi jajaran Kabinet Merah Putih, membuka sesi dialog interaktif dengan pelaku usaha. Dalam sesi ini, Presiden secara langsung menanggapi berbagai pertanyaan terkait prospek investasi, prioritas regulasi, serta isu-isu sektoral. Forum ini memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk menyampaikan pandangan industri dan masukan praktis kepada para pembuat kebijakan, sekaligus menyoroti peluang konkret di bidang perdagangan, pengembangan industri, teknologi, dan investasi jangka panjang, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi global yang kompetitif.

“Pernyataan Bersama antara BritCham dan Kadin Indonesia untuk mendukung implementasi Economic Growth Partnership (EGP) dan pembentukan perdana UK-Indonesia High-Level Business Council, mencerminkan kuatnya kepercayaan Inggris terhadap perekonomian Indonesia serta tingginya minat pelaku usaha Inggris untuk memperdalam hubungan mereka dengan Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian acara, Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House berlangsung dengan sangat lancar, dan berhasil mempertemukan para pemimpin bisnis Indonesia dan Inggris dalam diskusi yang terbuka dan konstruktif.

BritCham Indonesia sangat bangga berkesempatan memimpin jalannya forum tersebut guna mendukung penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara,” jelas Ketua Dewan Penasihat BritCham Indonesia dan CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama di Grand Staircase sebagai simbol kuatnya keterlibatan dunia usaha Inggris dan Indonesia.

Pernyataan Bersama dan Economic Growth Partnership

Sebelum berlangsungnya UK-Indonesia Business and Investment Forum, BritCham Indonesia dan Kadin Indonesia menandatangani Pernyataan Bersama pada 19 Januari 2026 yang mencerminkan komitmen kedua kamar dagang dalam mendukung UK-Indonesia Strategic Partnership dan Economic Growth Partnership.

Ketua BritCham Indonesia, Ian Betts, menyampaikan:

“BritCham Indonesia menyambut baik peluncuran UK-Indonesia Economic Growth Partnership, yang memperkuat kerangka kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan regulasi antara kedua negara. Kemitraan ini menjadi sinyal kuat atas komitmen bersama untuk menciptakan iklim usaha yang transparan, stabil, dan kondusif bagi investasi jangka panjang di Inggris dan Indonesia”.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menambahkan:

“Kadin Indonesia menyambut hangat penandatanganan UK-Indonesia Strategic Partnership yang memperkuat landasan kerja sama perdagangan, investasi, dan inovasi. Kami menantikan kolaborasi yang erat dengan BritCham dan para pemangku kepentingan Inggris untuk menerjemahkan momentum ini menjadi kerja sama konkret yang mendukung agenda pertumbuhan Indonesia.”

Kedua kamar dagang juga menyoroti potensi besar penguatan hubungan ekonomi bilateral, seiring nilai perdagangan bilateral UK-Indonesia yang mencapai USD 2,78 miliar pada 2024 dan menunjukkan tren peningkatan sejak 2020, serta realisasi investasi Inggris di Indonesia sebesar USD 402,6 juta hingga kuartal III 2025.

Dalam Pernyataan Bersama tersebut, BritCham Indonesia dan Kadin Indonesia juga menyepakati pembentukan UK-Indonesia High-Level Business Council sebagai wadah dialog tingkat tinggi untuk memberikan masukan sektor swasta dan menyusun rekomendasi terkoordinasi kepada kedua pemerintah di sektor-sektor prioritas.

Economic Growth Partnership ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia dan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kyle. Kemitraan ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama perdagangan di sektor-sektor prioritas seperti energi bersih, ekonomi digital, infrastruktur dan transportasi, serta pendidikan dan kesehatan.

Kemitraan tersebut dirancang untuk mengurangi hambatan akses pasar, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat investasi dua arah antara Inggris dan Indonesia. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste HMA Dominic Jermey CVO OBE dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris H.E. Desra Percaya.

BritCham Indonesia dan Kadin Indonesia menegaskan kembali dukungan penuh terhadap implementasi UK-Indonesia Strategic Partnership dan Economic Growth Partnership, serta kesiapan untuk terus bekerja sama dengan kedua pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tangguh, dan saling menguntungkan.

Global & Domestic Economic Outlook 2026:

Kadin Tekankan Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job hingga Pro-Environment



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie (enam dari kiri), Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani (lima dari kiri), Kepala Kantor Kadin Communication Office Primus Dorimulu (empat dari kiri) berfoto bersama para pembicara dan jajaran pengurus Kadin Indonesia dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar forum diskusi Global & Domestic Economic Outlook 2026 bertajuk “Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job, dan Pro-Environment” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/01/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah awal Kadin dalam membangun Kadin Trust Index, sebuah indeks berbasis data untuk mengukur kepercayaan dan sentimen dunia usaha.

“Kali ini kita bicara data. Ini adalah cikal bakal Kadin Trust Index. Kita mulai dengan pendataan dari industri, konsumen, hingga vendor untuk melihat bagaimana animo mereka dalam berusaha, baik di sektor produksi maupun jasa,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

Anin menegaskan bahwa Kadin optimistis terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari empat prinsip utama yang diusung, yakni pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie saat menyampaikan sambutan dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 yang bertemakan "Mendorong Peran Swasta Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-Growth Pro-Poor, Pro-Job & Pro Environment" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Anin menjelaskan, prinsip pro-poor penting untuk mengangkat masyarakat dari kondisi ekonomi yang kurang baik, sementara pro-job menjadi krusial mengingat tingkat pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda, masih berada di kisaran 4,85 persen.

Dari sisi pro-growth, Kadin menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,4-5,5 persen dengan prospek peningkatan di masa mendatang. Sementara itu, pro-environment menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan.

Anin juga menyoroti kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan berada di kisaran 3 persen. Namun, Indonesia dinilai tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Itu menandakan kepercayaan. Apalagi ini juga kepercayaan didasarkan dengan pertumbuhan perdagangan yang terus berlanjut sampai kuartal ketiga dan keempat tahun lalu,” kata Anin.

Selain itu, Anin juga menyinggung arah Indonesia menuju ketahanan energi yang kuat, seiring meningkatnya kebutuhan energi global, termasuk untuk pengembangan pusat data dan teknologi kecerdasan buatan (AI).



Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani (lima dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia dan para Narasumber dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya perhatian terhadap ekonomi daerah, yang selama ini dinilai belum banyak dikaji secara mendalam. Aviliani menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan pengurangan transfer daerah karena berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

“Kami mendorong agar ke depan ada evaluasi atas pengurangan transfer daerah. Pemerintah pusat juga perlu melibatkan daerah agar mereka tetap merasakan manfaat dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal International Economic Association Lili Yan Ing, memaparkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan kawasan ASEAN, adalah meningkatkan daya tarik investasi.



(Kiri ke kanan) Wakil Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Global Strategis Dinna Prapto Raharja, Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Daerah Prof. Telisa A. Faunty, Wakil Komite Tetap Kajian Global Kadin Indonesia Joshua Pardede saat menjadi pembicara, serta Ketua Komite Tetap Kajian Kebijakan Publik Hermanto Siregar sebagai moderator dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Indonesia kata Lili dinilai masih tertinggal dalam rasio investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap PDB, yang baru mencapai sekitar 1,2 persen, terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebagai perbandingan, Singapura mencatatkan rasio FDI terhadap PDB sebesar 27 persen, Vietnam 4,2 persen, sementara China pada masa awal pertumbuhan ekonominya berada di kisaran 6 persen.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan reformasi iklim usaha yang signifikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan RI Noor Faisal Achmad, yang mewakili Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa

pemerintah terus menjaga disiplin fiskal sebagai modal penting untuk keberlanjutan fiskal ke depan.

Ia menjelaskan bahwa defisit APBN berhasil dikendalikan di bawah 3 persen sesuai amanat undang-undang, setelah sempat melebar hingga 6,14 persen pada 2020 akibat pandemi. Pada 2025, defisit kembali ditekan ke level 2,92 persen, dengan rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 40 persen.

“Dengan disiplin fiskal yang terjaga, APBN dapat terus menjadi instrumen yang kredibel untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Wakil Komite Tetap Kajian Global Spillover Kadin Indonesia Joshua Pardede mengatakan kehadiran BPI Danantara memberikan harapan baru dalam pengelolaan dan akselerasi investasi strategis. Meski demikian, penggerak utama perekonomian tetap berada di sektor swasta.

“Karena itu, peran Kadin menjadi sangat penting dalam mendorong dan menopang percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Joshua.

Joshua menambahkan, belanja pemerintah tetap memegang peran penting sebagai pemicu pertumbuhan. Namun dengan berbagai agenda pembangunan dan program prioritas, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, sektor swasta menjadi tumpuan utama untuk menggerakkan investasi dan ekspansi ekonomi.

Lebih jauh, Wakil Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Global Strategis Dinna Prapto Raharja mengatakan posisi Indonesia yang selama ini banyak bekerja sama dengan China dalam eksplorasi mineral membuat Indonesia kerap dipersepsikan sebagai bagian dari China-centric mineral hub.

Situasi ini berpotensi menempatkan Indonesia dalam dilema strategis di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia. Di tengah ketidakpastian global tersebut, Dinna menilai Indonesia perlu memperkuat instrumen kerja sama yang sudah dimiliki.

CEPA dipandang sebagai kerangka yang jauh lebih strategis dibanding sekadar Free Trade Agreement, karena membuka ruang kerja sama yang lebih mendalam, fleksibel, dan terstruktur antar-aktor ekonomi.

“CEPA itu sangat beneficial bagi Indonesia. Sudah seharusnya dunia usaha, termasuk Kadin, fokus menjajaki dan mengoptimalkan setiap CEPA yang kita miliki. RCEP juga tantangannya lebih mirip CEPA daripada sekadar FTA,” ujarnya.

Dalam acara tersebut juga digelar peluncuran Kadin Business Pulse, sebuah survei dan insight berbasis data bagi pelaku usaha Indonesia.

Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri, menyatakan bahwa Kadin Business Pulse merupakan survei kuartalan pertama yang mengukur sentimen cepat dunia usaha dari seluruh Indonesia.

“Survei ini menjadi pelengkap data makro seperti pertumbuhan PDB dan inflasi, sekaligus mencerminkan sentimen riil pelaku usaha di lapangan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pertanian Devi Eka Rachmawati, WKU Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi Thomas Djusman, WKU Bidang Agraria, Tata Ruang dan Perwilayahan Ekonomi Sanny Iskandar, WKU Bidang Industri Kreatif Gilang Widya Pramana, WKU Bidang MICE Budiarto Linggowiyono, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, dan Pengembangan Produk UMKM Rifda Ammarina dan Kepala Kadin Communications Office Primus Dorimulu.

Hadir pula Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter dan Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, Faurani.

“



“ Kadin **optimistis** terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan **ekonomi** nasional. Hal tersebut tercermin dari empat prinsip utama yang diusung, yakni **pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment**. Dari sisi **pro-growth**, Kadin menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran **5,4-5,5** persen dengan prospek peningkatan di masa mendatang ”

ANINDYA NOVYAN BAKRIE
Ketua Umum Kadin Indonesia

“ Kami mendorong agar ke depan ada evaluasi atas pengurangan transfer daerah. Pemerintah pusat juga perlu melibatkan daerah agar mereka tetap merasakan manfaat dalam proses pengambilan kebijakan ”

AVILIANI
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan
Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia



”



“ Perlunya reformasi struktural dan reformasi iklim usaha yang signifikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi ”

LILI YAN ING
Sekretaris Jenderal International
Economic Association

“ Dengan disiplin fiskal yang terjaga, APBN dapat terus menjadi instrumen yang kredibel untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi ”

NOOR FAISAL ACHMAD
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi
Kementerian Keuangan RI



Kadin: Program MBG Berpotensi Tambah Pertumbuhan PDB hingga 3,5 Persen



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie saat menyampaikan sambutannya dalam acara MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (14/01/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menggelar Diskusi Makan Bergizi Gratis (MBG) Outlook bertajuk “Masa Depan Gizi Anak Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam sambutannya menegaskan, program MBG memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pembangunan sumber daya manusia maupun dunia usaha.

“Jika kita berbicara kepentingan bangsa, terutama anak-anak sebagai generasi masa depan, dampaknya sangat jelas. Dari target 82 juta penerima, saat ini sudah menjangkau sekitar 55 juta anak. Ini sangat berarti karena kita menginginkan lebih banyak insinyur, doktor, guru, hingga atlet di masa depan. Inilah cikal bakalnya,” ujar Anin, sapaan akrabnya.

Anin mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, dengan lebih dari 20.000 dapur di antaranya telah dibangun.

Dalam program tersebut, Kadin turut berpartisipasi dengan membangun sekitar 1.000 SPPG, yang didukung oleh kontribusi anggota Kadin dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.



Jajaran Pengurus Kadin Indonesia berfoto bersama para Narasumber MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (14/01/2026).

“Program MBG ini merupakan pintu masuk strategis bagi penguatan ketahanan pangan nasional. Ujung dari ketahanan pangan adalah hilirisasi. Hilirisasi pertanian hanya masuk akal jika ada kepastian permintaan. Dengan MBG, kebutuhan pangan sangat nyata. Dari 52 juta penerima hari ini menuju 82 juta, artinya dibutuhkan sekitar 52 juta butir telur per hari, ayam, sayur-mayur, ikan, dan lainnya,” jelas Anin.

Lebih lanjut, Anin menilai bahwa setiap daerah memiliki potensi protein unggulan masing-masing, sehingga program MBG mendorong keterlibatan daerah secara aktif. Pemerintah daerah dan pelaku usaha berlomba-lomba mendapatkan titik dapur MBG agar dapat berpartisipasi langsung.

“Yang membanggakan, hingga saat ini mayoritas dapur MBG masih dijalankan dengan pendanaan mandiri. Kadin bangga dapat menjadi bagian dari program ini. Jika satu titik membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja dan dikalikan 30 ribu dapur, berarti ada potensi penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja. Secara ekonomi, ini berpotensi menambah pertumbuhan PDB hingga 3,5 persen. Angka ini bukan angka kecil dan bisa menjadi salah satu motor pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Anin.

Anin juga menegaskan bahwa MBG membuka peluang besar bagi anggota Kadin di daerah dan asosiasi usaha, mulai dari pasokan ayam, telur, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan, hingga susu. Selain itu, peluang juga terbuka di sektor hulu, cold chain, logistik pangan, koperasi, hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Protein.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, yang hadir mewakili Kepala BGN Dadan Hindayana, menekankan bahwa tantangan utama BGN ke depan adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Target paling menantang bagi BGN adalah mencegah inflasi dan kelangkaan bahan pangan. Kami berharap Kadin, khususnya pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan, dapat memperbesar kapasitas produksi. Kebutuhan beras saja bisa mencapai 3 juta ton per tahun,” ujar Tigor.

Lebih lanjut, Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony menilai bahwa diskusi mengenai MBG merupakan isu strategis yang tengah menjadi perhatian nasional.

Menurutnya, program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan.

“Ini adalah hot topic di Indonesia saat ini. Kita semua mendukung program MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo. Tentu dalam perjalanannya tidak terlepas dari kritik, dan itu penting untuk penyempurnaan ke depan,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi Kadin Indonesia Thomas Djusman, Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong-Royong Kadin Indonesia Desi Arianti, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter dan Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, Faurani.



SPPG MBG Gotong Royong Kadin Hadir di Deli Serdang, Siap Layani Ribuan Penerima Manfaat

Deli Serdang - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali memperluas jangkauan program pemenuhan gizi masyarakat.

Terbaru, SPPG MBG Gotong Royong Kadin resmi hadir di wilayah Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program nasional MBG yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di sekitar lokasi SPPG.

Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Desi Arianti, menyampaikan bahwa SPPG MBG Gotong Royong Kadin di Deli Serdang dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Januari 2026, setelah dinyatakan lolos survei oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Mereka baru saja lolos dari survei BGN dan dinyatakan layak menjadi mitra BGN. Saat ini tinggal penentuan kepala SPPG,” ujar Desi pada Kamis (08/01/2026)

Desi menjelaskan, SPPG di Deli Serdang merupakan bagian dari target besar Kadin Indonesia dalam pengembangan dapur MBG secara nasional. Kadin menargetkan pembangunan hingga 1.000 dapur, dengan 500 dapur aglomerasi ditargetkan sudah beroperasi penuh pada Januari hingga Februari 2026.

“Target kita seribu dapur. Ini adalah salah satu dapur dari 500 dapur aglomerasi yang sudah berjalan di Kadin. Pada Januari dan Februari ini, 500 dapur tersebut benar-benar sudah operasional semua,” jelas Desi

Desi menerangkan bahwa SPPG MBG Gotong Royong Kadin terbagi ke dalam dua tipe, yakni dapur reguler aglomerasi dan dapur wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dapur aglomerasi Kadin memiliki kapasitas layanan yang lebih besar dengan standar operasional yang ketat.

“Dapur aglomerasi itu dapur reguler Kadin. Untuk penerima manfaat, dapur ini bisa melayani hingga 3.000 orang jika memiliki chef (juru masak) profesional. Seluruh SPPG Kadin kami wajibkan memiliki chef profesional, artinya kami siap dan mampu melayani hingga 3.000 penerima manfaat,” ujar Desi.

Lebih lanjut, Desi berharap keberadaan dapur SPPG MBG di Percut Sei Tuan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Sesuai ketentuan, dapur SPPG melayani penerima manfaat dalam radius maksimal lima kilometer dari lokasi dapur.

“Harapannya, dapur di Deli Serdang ini benar-benar bisa bermanfaat dan memberikan MBG di daerah tersebut. Yang pasti, kami berharap gizi anak-anak di wilayah Percut (Sei tuan) bisa meningkat,” tutup Desi.

Kadin Sharia Economic Outlook 2026: Memperkuat Industri Halal Berdaya Saing Global



(Kiri ke kanan) Kepala Kantor Kadin Communication Office Primus Dorimulu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo, serta Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Banjaran Surya Indrastomo berfoto bersama di sela-sela acara Kadin Sharia Economic Outlook, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/01/2026).



Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah (tiga dari kiri) dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo (tiga dari kanan) usai menandatangani nota kesepahaman mengenai kemitraan dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan syariah, serta pengembangan industri halal dan ekosistem pendukungnya, di sela-sela acara Kadin Sharia Economic Outlook, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Kadin Sharia Economic Outlook 2026 dengan mengusung tema “Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness and Global Export Readiness” di RGE Lounge Lt. 29, Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini membahas arah dan prospek ekonomi syariah ke depan, sekaligus peran Kadin sebagai akselerator pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional.

Titi menegaskan sesuai dengan arahan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha terus mendorong Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal global.

“Target kita adalah menguasai pasar domestik, menjadi pemain utama ekonomi syariah, sekaligus memiliki daya saing kuat di pasar global,” ujar Titi.

Titi menambahkan bahwa Kadin berharap ekonomi syariah Indonesia dapat terus memberikan manfaat nyata dan berkontribusi dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan, lanjut Titi, adalah Indonesia Sharia Economic Center, sebagai wadah yang mempertemukan para pelaku usaha industri halal.

“Melalui platform ini, Kadin Indonesia juga mendorong promosi dan penguatan Kadin Halal Hub sebagai pusat kolaborasi, fasilitasi, dan pengembangan industri halal nasional,” pungkas Titi.



Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Puspa, menyoroti potensi besar pariwisata ramah muslim. Ia mengakui bahwa pembahasan wisata halal kerap dianggap sensitif, namun jika dipahami secara tepat justru menjadi peluang strategis.

Dengan jumlah penduduk Muslim lebih dari 86 persen, Indonesia dinilai memiliki keunggulan besar dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim seiring perubahan struktur pasar dan preferensi wisatawan global.

“Pariwisata ramah muslim adalah layanan tambahan yang mencakup amenitas, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisatawan Muslim, sejalan dengan tren experience-based tourism,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, menekankan potensi ekspor produk halal dalam meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2024, total nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai 41,4 miliar dolar AS, dengan kontribusi terbesar dari sektor makanan dan minuman sebesar 33,6 miliar dolar AS, diikuti fesyen halal 6,83 miliar dolar AS, serta kosmetik halal 363 juta dolar AS.

“Potensi tersebut terus meningkat seiring penguatan ekspor melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) sertifikasi halal Indonesia yang telah diakui di 16 negara, serta kerja sama bilateral bidang halal dengan lima negara mitra,” ujar Roro.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa industri halal di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah, dengan catatan ekosistem halal diperkuat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Kita perlu membangun kultur pemahaman industri halal sekaligus memperkuat infrastruktur pendukungnya. Kementerian Dalam Negeri terus bersinergi agar para pemimpin daerah bukan hanya memahami, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat ekosistem halal, termasuk melalui dukungan APBD untuk sertifikasi halal, edukasi, dan pengembangan keunggulan daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan, memastikan bahwa BPJPH telah menjalin Mutual Recognition Agreement dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait penerapan sertifikasi halal.

Perjanjian yang dilakukan bersama United States Trade Representative (USTR) dan United States Defense Representative (USDR) tersebut menjadi dasar pengakuan sertifikasi halal bagi produk Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan kedua negara.

“Antara Amerika (Serikat) dengan BPJPH telah terjalin kesepakatan tentang penerapan halal. Baik produk dari Amerika (Serikat) yang masuk ke Indonesia, ataupun produk Indonesia yang masuk ke Amerika (Serikat),” jelasnya.

Target Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Global

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel. Dalam diskusi tersebut, CEO investortrust.id sekaligus Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia Primus Dorimulu, menilai Indonesia memiliki modal fundamental yang nyaris sempurna untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, mulai dari populasi Muslim terbesar di dunia, kerangka regulasi yang matang, hingga dukungan kelembagaan yang kuat.

Namun demikian, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terintegrasi menjadi kekuatan ekonomi yang saling menguatkan.

“Kemajuan paling nyata justru terlihat di industri halal, terutama makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta fesyen muslim. Industri ini tumbuh pesat karena digerakkan oleh konsumsi domestik dan UMKM, didukung sertifikasi halal, digitalisasi rantai pasok, serta keterhubungan dengan pasar ekspor,” ujarnya.

Acara diskusi panel yang terbagi dalam dua sesi ini juga menghadirkan narasumber di antaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol Sony Sonjaya, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI Cecep Rukendi, Founder Sour Sally Group Donny Pramono, CEO Zahir Internasional Muhammad Ismail, dan Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Banjara Surya Indrastomo.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan pengembangan industri halal dan sertifikasi halal beserta ekosistem pendukungnya, optimalisasi produk keuangan syariah, pengembangan UMKM industri halal berbasis digital, peningkatan kualitas SDM dan nilai ekspor produk halal nasional, penguatan ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah serta pusat data ekonomi syariah, edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah, melalui implementasi brand Ekonomi dan Keuangan Syariah yang inklusif dan kolaboratif.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati, WKU Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi Kadin Indonesia Mufti Mubarak, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina, Bidang Perlindungan Pekerja Migran Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi dan Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung.



(Kiri ke kanan) Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI Cecep Rukendi, CEO Investortrust yang merupakan Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia Primus Dorimulu, serta Senior Vice President SME PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Risqi Widayat saat menjadi pembicara dalam diskusi panel Kadin Sharia Economic Outlook, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Ekosistem Syariah Terbentuk,

Tapi Tidak Terorkestrasi

Jakarta — Ekosistem ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia sejatinya telah terbentuk relatif lengkap. Industri halal, keuangan syariah, ekonomi sosial berbasis zakat dan wakaf, hingga sektor pendukung seperti haji, umrah, dan pariwisata halal telah hadir dan berkembang dalam satu lanskap yang luas. Namun, di balik kelengkapan itu, kemajuan antar-sektor berjalan timpang. Sektor riil justru melaju lebih cepat, sementara sektor keuangan syariah —yang semestinya menjadi tulang punggung— masih tertinggal dan belum menunjukkan lompatan berarti.

Indonesia kerap disebut memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. “Ekosistemnya lengkap, regulasinya tersedia, pasarnya besar. Namun satu pertanyaan mendasar terus mengemuka adalah mengapa keuangan syariah justru tertinggal jauh, sementara sektor riil syariah melaju tanpa orkestrasi?” ujar Primus Dorimulu, Kepala Kadin Communication Office (KCO) dalam sesi diskusi di Kadin Sharia Economic Outlook 2026, Rabu (26/01/2026).

Indonesia, kata Primus, memiliki modal fundamental yang nyaris sempurna untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Populasi Muslim terbesar di dunia, kerangka regulasi yang relatif matang melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional MUI, serta dukungan kelembagaan seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menyediakan fondasi kebijakan yang kuat. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang terintegrasi dan saling menguatkan.

▲ DATATRUST
Top 10 Negara Aset Keuangan Syariah, 2023

Negara	Total Aset Keuangan Syariah (US\$, miliar)	Aset Perbankan Syariah (US\$, miliar)	Aset Takaful (US\$, miliar)	Nilai Outstanding Sukuk (US\$, miliar)	Dana Kelolaan Reksadana Syariah (US\$, miliar)	Lainnya (US\$, miliar)
1 Iran	1.676	1.482	36	26	103	29
2 Arab Saudi	1.113	794	19	245	21	34
3 Malaysia	682	275	17	313	32	45
4 Uni Emirat Arab	371	274	4	56	31	6
5 Kuwait	198	179		12		7
6 Qatar	162	116	1	21		12
7 Indonesia	150	53	3	99	3	4
8 Bahrain	150	126	1	16		7
9 Turki	107	69	2	27	9	
10 Pakistan	58		1	22	4	

Catatan: Aset lainnya meliputi perusahaan investasi syariah, pembiayaan syariah, fintech syariah yang menyediakan layanan pembiayaan bukan teknologi, perusahaan pembiayaan mikro syariah.
Tabel: S. Aji © Investortrust.id • Sumber: ICD-LSEG Islamic Finance Development Report 2024 • Dibuat dengan Datawrapper

Kemajuan paling nyata justru terlihat di industri halal, khususnya makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta fesyen muslim. Sektor ini tumbuh pesat karena digerakkan langsung oleh konsumsi domestik dan UMKM, bukan oleh insentif keuangan. Sertifikasi halal yang semakin masif, digitalisasi rantai pasok, serta keterhubungan dengan pasar ekspor menjadikan industri halal sebagai motor utama ekonomi syariah Indonesia.” Di sektor ini, syariah dipahami sebagai value proposition —jaminan kualitas, kebersihan, dan kepercayaan—, bukan sekadar label ideologis,” jelas Primus yang juga CEO Investortrust.

Selain industri halal, ekonomi sosial syariah berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga menunjukkan dinamika positif. Digitalisasi pengumpulan zakat, tumbuhnya lembaga amal zakat swasta, serta mulai berkembangnya konsep wakaf produktif untuk UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan memperlihatkan bahwa syariah sosial relatif lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, sektor ini masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan sistem keuangan formal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Sementara itu, ekosistem haji dan umrah, termasuk travel, logistik, dan hospitality halal, berkembang stabil karena berbasis kebutuhan riil dan permintaan yang konsisten. Sektor ini memperkuat ekosistem syariah secara keseluruhan, tetapi sekali lagi berjalan tanpa keterkaitan strategis dengan industri keuangan syariah.

“Ironisnya, di tengah kemajuan sektor-sektor tersebut, keuangan syariah justru tertinggal,” ungkapnya. Pangsa pasar perbankan syariah nasional masih berada di kisaran 6–7 persen dari total industri perbankan, sementara asuransi syariah lebih kecil lagi. Capaian ini tertinggal jauh dibandingkan Malaysia yang pangsa keuangan syariahnya telah melampaui 30 persen, maupun negara-negara Teluk yang menjadi pemain utama aset keuangan syariah global.

Masalahnya bersifat struktural. Produk keuangan syariah, demikian Primus, kerap dinilai kurang kompetitif, dengan biaya yang lebih mahal dan struktur yang menyerupai produk konvensional. Skala usaha yang terbatas membuat efisiensi rendah, sementara inovasi berbasis prinsip risk-sharing sejati seperti mudharabah dan musyarakah belum berkembang optimal. Pertumbuhan industri juga lebih banyak digerakkan oleh dorongan regulasi ketimbang permintaan pasar, sehingga keuangan syariah belum benar-benar menjadi pilihan rasional bagi masyarakat luas.

Rendahnya literasi keuangan syariah memperparah keadaan. Banyak konsumen Muslim belum melihat keunggulan ekonomi yang nyata dari produk syariah selain aspek kepatuhan. Persepsi bahwa layanan keuangan syariah lebih rumit dan mahal masih kuat, sehingga tingkat adopsi berjalan lambat. Di sisi lain, inovasi digital dan pengembangan produk berbasis teknologi masih terbatas, termasuk di sektor fintech dan aset digital yang kerap belum memiliki kepastian fatwa.

Kondisi ini melahirkan paradoks besar: ekosistem syariah Indonesia sudah terbentuk, tetapi tidak terhubung. Industri halal, UMKM, ZISWAF, dan keuangan syariah berkembang sendiri-sendiri tanpa orkestrasi. Keuangan syariah belum berfungsi sebagai enabler utama bagi sektor riil, melainkan sekadar menjadi satu sektor tersendiri dalam ekosistem yang terfragmentasi. Persoalan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) juga masih kerap disorot sebagai kelemahan serius di sejumlah lembaga keuangan syariah.

Ke depan, kata Primus, transformasi ekonomi syariah Indonesia menuntut perubahan paradigma dari syariah yang bersifat formal dan regulatif menuju syariah yang fungsional dan solutif. Integrasi keuangan syariah dengan industri halal, pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan, serta pemanfaatan wakaf produktif sebagai penyangga risiko menjadi kunci agar seluruh ekosistem bergerak serempak. Tanpa integrasi dan orkestrasi yang kuat, potensi besar ekonomi syariah Indonesia akan terus tertahan—meski fondasinya telah lama berdiri kokoh.

”Mood” Pengusaha Positif,

Kadin Optimistis Investasi 2026 Bisa Menguat



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie berfoto bersama para pembicara “40 BIG Conference” 2026 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (09/12/2025).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran krusial dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anindya atau Anin menyebut salah satu tantangan utama Indonesia saat ini adalah kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 2,5 hingga 3 juta orang per tahun.

“Fokusnya, kalau di dunia usaha, bagaimana meningkatkan lapangan kerja. Jumlahnya itu bisa sampai 2,5 juta-3 juta dibutuhkan setiap tahun,” ujar Anin dalam acara 40 Bisnis Indonesia Group Conference bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (09/12/2025).

Anin menjelaskan bahwa struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan bagaimana dunia usaha menjadi motor utama ekonomi nasional. Pemerintah menyumbang sekitar 8% dari belanja nasional, sementara 57% berasal dari konsumsi domestik, 28% dari investasi, dan sisanya dari net ekspor-impor sekitar 7%.

“Jadi benar-benar dunia usaha itu mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan daya beli dan juga investasi,” tegas Anin.

Lebih lanjut kata Anin, Kadin selalu berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil menengah. Anin menyebut suasana batin atau “mood” pengusaha saat ini relatif baik.

Dikatakan Anin bahwa pengusaha besar yang menjadi penyedia lapangan kerja terbesar, tengah mempertimbangkan peluang investasi baru. Namun Anin mengingatkan bahwa iklim usaha harus tetap dijaga.

“(Ibarat) ‘Ayam’-nya (baca: pengusahanya) jangan sampai stres,” ujar Anin.

Anin menambahkan bahwa semangat kolaborasi yang digaungkan pemerintah melalui konsep Indonesia Incorporated atau gotong royong memberi keyakinan baru kepada pelaku usaha besar. Model kerja sama tidak hanya melalui co-investment, tetapi juga melalui kolaborasi di bidang pengelolaan aset dan berbagai proyek bersama.

Di sisi lain sambung Anin, pelaku usaha menengah dan kecil yang mencakup sebagian besar anggota Kadin, lebih mudah merasakan tekanan ekonomi, terutama di daerah. Pemangkasan alokasi anggaran ke daerah, membuat kondisi semakin menantang.

“Mereka banyak dari daerah. Dari APBN sekitar Rp3.600 triliun, sepertiganya itu dipotong 30-40%. Jadi dana ke daerah lebih kecil,” jelas Anin.

Meski begitu, Anin menilai beberapa program sosial pemerintah mampu menjaga optimisme, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie menerima cinderamata dari Bisnis Indonesia Group (BIG) pada BIG Conference 2026 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (09/12/2025).

Dari rencana 30 ribu dapur pusat, Kadin terlibat dalam pembangunan 1.000 dapur, dengan 500 di antaranya sudah beroperasi.

“500 itu dikalikan Rp1,5 miliar, jadi Rp750 miliar. Itu tidak kecil. Dan jaminan mereka cuma satu: Ketum bilang oke, pemerintah bayar,” ungkap Anin.

Menurut Anin, dapur yang sudah berjalan rata-rata mampu balik modal dalam 10-12 bulan dan menghasilkan sekitar Rp170 juta per bulan, sebuah capaian yang ia nilai signifikan bagi pelaku usaha di daerah.

Selain MBG, Anin juga menyoroti pentingnya mengawal program Koperasi Merah Putih dan pembangunan rumah layak huni yang ditargetkan mencapai 3 juta unit per tahun. Dikatakan Anin, keberhasilan program-program besar tersebut tidak hanya bergantung pada anggaran APBN, tetapi juga pada pemantauan dan implementasi yang konsisten.

“Budget-nya besar, kita harus kawal. Tapi yang kedua, manfaatnya bisa besar. Jadi benar-benar supaya hasil sesuai. Jadi kembali ke pertanyaan singkat, optimistis apa tidak? Saya rasa tugas kita adalah harus optimistis,” tutup Anin.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto (kiri) berfoto bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie (kanan) usai menyampaikan sambutannya dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Road to JFSS 2026: Pemerintah dan Kadin

Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Jakarta – Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok pangan dunia, ketahanan pangan menjadi isu strategis bagi Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Isu tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Kegiatan ini merupakan rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang akan diselenggarakan pada 20–21 Mei 2026.



Jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan para pembicara berfoto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 yang diselenggarakan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Forum diskusi yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Katadata ini digelar sebagai respons atas dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang secara nyata menekan sistem pertanian dan pangan global, termasuk di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.

Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21 persen, namun diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.

Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi.

Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.

Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut akan memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap JFSS 2026. Forum ini merupakan penyelenggaraan keenam sejak era Presiden SBY hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan akrabnya.

Ia juga menyoroti potensi penerapan closed-loop system ke sektor hortikultura dan pangan lainnya, terutama jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, fokus Kadin ke depan adalah memperkuat sektor pangan dan pangan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur. JFSS 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Adapun, Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.

Menurutnya, percepatan capaian tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hukum Widodo menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujar dia.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie saat menyampaikan sambutannya dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujar dia.

Widodo juga menyoroti pentingnya instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan bagi sektor pertanian. “Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.

Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret dan kolaborasi nyata.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe serta WKUK Bidang Hukum dan HAM Sarana/Prasarana M. Aziz Syamsuddin.

Hadir pula Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Agraria, Tata Ruang dan Perwilayahan Ekonomi Kadin Indonesia Sanny Iskandar, WKU Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin, WKU Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Eka Rachmawati, WKU Bidang Peningkatan Kapasitas dan Permodalan Ekspor Kadin Indonesia Rahmat Samulo, WKU Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Risiko Kadin Indonesia Reginald FM Engelen, WKU Bidang Peningkatan Perdagangan Antar Daerah Kadin Indonesia Ali Dupa, WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter.

Survei Perdana Kadin Business Pulse:

Sentimen Positif Pelaku Bisnis Lebih Dominan di Kuartal IV 2025



Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute (KII), Mulya Amri saat menyampaikan hasil Survei Perdana Kadin Business Pulse dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/01/2026).

Jakarta - Menjelang tahun 2026, para pelaku bisnis diliputi sentimen positif. Survei perdana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Business Pulse yang dilakukan Kadin Indonesia Institute menunjukkan sentimen positif di kalangan pelaku usaha mencapai 40%, lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif sebesar 35%. Adapun responden yang menilai kondisi usaha biasa saja tercatat 25%.

Faktor utama pendorong sentimen positif tersebut adalah perbaikan atau perkembangan pasar sebesar 38%, disusul persaingan usaha yang lebih kondusif (24%) dan regulasi yang membaik (23%).

Merespons produk perdana Kadin Business Pulse, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi.

“Ke depan, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan berbicara dengan data aktual yang diproduksi sendiri, yakni oleh Kadin Indonesia Institute,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat peluncuran Kadin Business Pulse di sela-sela forum diskusi Global & Domestic Economic Outlook 2026 bertajuk “Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job, dan Pro-Environment” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/01/2026).

Sementara itu, Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri, mengatakan hasil yang ditampilkan merupakan survei perdana atau pilot edition Kadin Business Pulse Kuartal IV 2025.

“Ini adalah survei sentimen dunia usaha yang dirancang sebagai instrumen pemantauan cepat dan berkala terhadap kondisi bisnis dan perekonomian nasional,” kata Mulya.

Sebagaimana oksimeter yang digunakan untuk mengukur denyut nadi manusia, KII melalui Kadin Business Pulse melakukan pengukuran perkembangan dunia usaha melalui survei terhadap anggota Kadin yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei perdana ini dilaksanakan pada 1–23 Desember 2025 dengan melibatkan 155 responden anggota Kadin Indonesia dari berbagai daerah, sektor, dan skala usaha.

KII menyebut inisiatif ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pemantauan ekonomi yang lebih ringkas dan responsif, sejalan dengan target nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 8% serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0%.

Berdasarkan hasil survei, sentimen positif di kalangan pelaku usaha tercatat 40%, lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif sebesar 35%. Sementara itu, pendorong utama sentimen positif adalah perbaikan atau perkembangan pasar (38%), disusul persaingan usaha yang lebih kondusif (24%), serta regulasi yang membaik (23%). Hasil survei ini menunjukkan optimisme pelaku usaha dalam memasuki tahun 2026.

Untuk menjaga sentimen positif tersebut, menurut Mulya, sejumlah area perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan. Area prioritas utama adalah perbaikan kebijakan dan regulasi pemerintah (20%), diikuti akses pembiayaan (17%), permintaan (13%), serta tenaga kerja (9%).

“Temuan ini menunjukkan tantangan dunia usaha masih didominasi isu struktural, terutama terkait regulasi serta ketersediaan dan kemudahan pendanaan, di tengah permintaan yang perlu diperkuat,” jelas Mulya di Menara Kadin, Jakarta.

Dari perspektif sektoral, survei Kadin Business Pulse Kuartal IV 2025 menunjukkan sektor dengan sentimen positif terbesar adalah jasa keuangan dan asuransi. KII memandang sinyal ini penting untuk membaca arah optimisme pelaku usaha, termasuk terkait rencana investasi dan ekspektasi perbaikan kondisi usaha pada 2026.

Selama ini, lanjut Mulya, data ekonomi formal seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dipublikasikan secara triwulanan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, informasi berkala mengenai sentimen pelaku usaha dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi dunia usaha nasional. Oleh karena itu, Kadin Business Pulse diinisiasi sebagai survei berkala untuk menangkap sentimen dan persepsi pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan investasi di Indonesia.

Dalam paparannya, Mulya menyebut survei ini memiliki manfaat untuk melengkapi data ekonomi formal seperti PDB dan Sakernas dengan perspektif dunia usaha, baik secara retrospektif (kuartal sebelumnya) maupun prospektif (kuartal berikutnya). Selain itu, survei ini ditujukan untuk menghadirkan wawasan cepat dan dapat ditindaklanjuti bagi perumusan kebijakan pemerintah dan strategi sektor swasta, serta meningkatkan pemahaman terhadap kondisi bisnis di lapangan dan prospek ekonomi ke depan.

Tujuan pelaksanaan Kadin Business Pulse, kata Mulya, antara lain untuk menunjukkan kemampuan Kadin Indonesia dalam melaksanakan, menganalisis, dan mempublikasikan survei yang berkualitas dan kredibel. Selain itu, survei ini juga bertujuan membentuk basis data anggota Kadin Indonesia guna mendukung program dan kegiatan Kadin ke depan. Program ini dirancang sebagai sistem pemantauan reguler dan konsisten terhadap sentimen bisnis, dengan memanfaatkan jaringan anggota Kadin mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.

Dari sisi metodologi, penentuan responden dilakukan melalui metode random sampling. Pelaksanaan survei dilakukan secara daring melalui WhatsApp dan formulir survei online.

Enam topik utama yang disurvei mencakup persepsi kondisi bisnis saat ini dibandingkan kuartal sebelumnya, persepsi kondisi sektor industri, rencana investasi enam bulan ke depan, tantangan utama bisnis, perkembangan positif yang dirasakan pelaku usaha, serta tingkat keyakinan terhadap perbaikan kondisi bisnis dan perekonomian pada 2026.

Mulya menyampaikan apresiasi kepada para pengurus dan anggota Kadin yang telah mendukung pelaksanaan survei perdana ini. KII juga meminta dukungan untuk pelaksanaan survei berikutnya, yakni Kadin Business Pulse Kuartal I 2026 yang direncanakan berlangsung pada Maret 2026.

Temui Mendag, Ketum Kadin Dorong ABAC

Jadi Momentum Ekspansi Perdagangan



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Barie dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso usai Audiensi di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat pada Senin (12/01/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Usai pertemuan, Anindya atau Anin sapaan akrabnya menyampaikan rencana pelaksanaan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) Meeting I yang akan digelar di Jakarta pada 7-9 Februari 2026. Pertemuan ini dinilai istimewa karena melibatkan perwakilan dunia usaha dari 21 negara-negara anggota APEC.

“ABAC ini spesial karena dihadiri negara-negara yang secara global terlihat saling bersaing, seperti Amerika Serikat, China, Kanada, dan Rusia, serta negara-negara ASEAN dan Asia Timur.

Masing-masing negara membawa tiga perwakilan dunia usaha dengan level pimpinan,” ujar Anin.

Dijelaskan Anin bahwa kehadiran para pemimpin bisnis tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai forum ABAC, tetapi juga untuk memperluas perdagangan Indonesia melalui kegiatan business matching.

“Kami laporkan kepada Menteri Perdagangan bahwa momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama perdagangan Indonesia dengan berbagai negara, termasuk Eropa, Kanada, dan kawasan Eurasia. Ini kolaborasi konkret antara pemerintah dan dunia usaha,” jelas Anin.

Selain ABAC, Anin juga membahas gagasan Menteri Perdagangan RI terkait pembentukan Business Council pada setiap kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang telah ditandatangani Indonesia.



Audiensi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie (tiga dari kiri) dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso (tiga dari kanan) didampingi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Azhar Cakra Wijaya (dua dari kiri) dan Chief of Staff Chairman Office Harya M. Hidayat (kiri) di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pada Senin (12/01/2026).

“Selama ini belum ada Business Council yang secara khusus mengawal implementasi CEPA, terutama dari sisi perdagangan. Padahal, selain investasi, perdagangan juga perlu didorong. Contohnya, kita sudah punya Business Council dengan India dan Prancis, dan ke depan bisa dibentuk dengan Uni Eropa, Eurasia, maupun Kanada,” kata Anin.

Lebih lanjut, Anin juga menyoroti keberadaan platform online business matching milik Kementerian Perdagangan RI yang dinilai efektif mendukung UMKM. Menurutnya, selama dua tahun terakhir platform tersebut telah mencatat transaksi hampir 150 juta dolar AS.

“Keunggulan platform online ini adalah berjalan 24 jam dan tidak terbatas pada event tertentu seperti pameran. Ini sangat membantu UMKM untuk terus terhubung dengan pasar global,” ujar Anin.

Selain itu, Anin juga menyinggung komoditas kopi, teh, dan kakao. Selama ini, pusat perdagangan komoditas tersebut banyak berpusat di Inggris. Anin mendorong agar Indonesia mulai mengambil peran sebagai pusat perdagangan kopi global.

“Indonesia adalah produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kolombia. Kita punya arabika, robusta, hingga kopi luwak. Ke depan, pusat perdagangan kopi idealnya juga bisa berada di Indonesia,” pungkas Anin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Azhar Cakra Wijaya dan Chief of Staff Chairman Office Harya M. Hidayat.

Rapat Pengurus Harian: Dorong Investasi, Perdagangan, dan Ketahanan Ekonomi Nasional, Kadin Siapkan Empat Agenda Strategis Awal Tahun

- World Economic Forum (WEF) Davos
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC)
- Jakarta Food Security Summit
- Indonesia Economic Outlook



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie pada saat memimpin diskusi dalam Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia mengenai 4 Agenda Strategis yang akan dilaksanakan oleh Kadin Indonesia di Tahun 2026, pada Jumat (09/01/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran pengurus dalam acara rapat persiapan Empat Agenda Strategis yang akan dilaksanakan di awal tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia pada Jumat (09/01/2026)

Kadin Indonesia Institute Gelar Executive Brief Tingkatkan Kinerja Perusahaan Tahun 2026



Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute (KII) Mulya Amri (tiga dari kiri) dalam acara Executive brief bertajuk Gallup Survey: State of the Global Workplace 2026 yang dilaksanakan di Menara Kadin Indonesia pada Jumat (23/01/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute menggelar Executive Brief bertajuk Gallup Survey: State of the Global Workplace 2026 di Menara Kadin Indonesia Jakarta, Jumat (23/01/2026).

Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan Kadin Executive Brief yang bertujuan memberikan wawasan strategis kepada anggota dan pengurus Kadin untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

“Ini adalah kegiatan yang kami selenggarakan setiap bulan untuk memberikan insight kepada anggota dan pengurus Kadin mengenai isu-isu menarik dan relevan yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja perusahaan,” ujar Mulya.

Dalam Executive Brief kali ini, Kadin Indonesia Institute menghadirkan Roma Tampubolon, Certified Gallup Strengths Coach sekaligus CEO & Founder Strengths ID, mitra resmi Gallup Indonesia. Gallup dikenal sebagai lembaga riset global yang secara konsisten melakukan survei dan kajian mendalam terkait pengelolaan tempat kerja.

“Salah satu laporan yang dirilis Gallup setiap tahun adalah Global State of the Workplace. Melalui forum ini, kami mengundang Pak Roma untuk memaparkan temuan dan insight terbaru terkait pengelolaan tempat kerja, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM),” jelas Mulya.

Ia menilai materi yang disampaikan sangat relevan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya dalam mengelola SDM berbasis kekuatan (strength-based approach) masing-masing pekerja.

Sementara itu, Roma Tampubolon menyoroti tren dunia kerja pada 2026 yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi akan semakin memudahkan berbagai proses kerja, namun interaksi antar-manusia tetap menjadi faktor kunci.

“Di 2026, justru human interaction akan semakin penting. Akan semakin banyak manajer dan karyawan yang perlu memahami coaching, yakni membangun percakapan dan interaksi yang mampu meningkatkan motivasi, jika kita melihat ke arah yang positif, itu akan membawa semangat dan harapan,” pungkasnya.



Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri dan Roma Tampubolon selaku Certified Gallup Strengths Coach sekaligus CEO & Founder Strengths ID memberikan keterangan pers setelah acara Executive Brief bertajuk Gallup Survey: State of the Global Workplace 2026 di Menara Kadin Indonesia Jakarta, Jumat (23/01/2026).

MoU & Join Statement Kadin Indonesia

Desember 2025-Januari 2026



01 Desember 2025

Rapimnas Kadin Indonesia 2025
Kementerian Perdagangan RI

Mencakup pertukaran data dan informasi, pengembangan SDM perdagangan, pemberdayaan UMKM, penguatan bursa komoditi, serta penguatan pasar produk nasional.

CompTIA

01 Desember 2025

Rapimnas Kadin Indonesia 2025
CompTIA

Memperkuat kolaborasi pendidikan dan profesional melalui peningkatan kapasitas TIK, sertifikasi global, transformasi digital, dan pengembangan ekosistem ekonomi digital.

MUSIAD
INDONESIA

01 Desember 2025

Rapimnas Kadin Indonesia 2025
Musiad Indonesia

MoU ini difokuskan pada penguatan daya saing wirausaha perempuan melalui akses pasar, investasi, kemitraan bisnis, digitalisasi usaha, dan pengembangan usaha berkelanjutan.



02 Desember 2025

Rapimnas Kadin Indonesia 2025
Kementerian Investasi & Hilirisasi

Mou ini meliputi pertukaran informasi, promosi bersama, fasilitasi penanaman modal, pengembangan iklim investasi, serta dukungan hilirisasi dan industrialisasi berkelanjutan.



01 Desember 2025

Kementerian Koperasi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi pertukaran informasi, promosi bersama, fasilitasi penanaman modal, pengembangan iklim investasi, serta dukungan hilirisasi dan industrialisasi berkelanjutan.



09 Desember 2025

The Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry (FPCCI)

MoU ini mencakup pembentukan dan penguatan IPCCI sebagai wadah kolaborasi dunia usaha Indonesia-Pakistan dalam mendorong perdagangan, investasi, dan iklim usaha yang kondusif.



10 Desember 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Perjanjian ini mengatur kerahasiaan kerja sama dalam Program Penyediaan Hunian dan Perumahan Kota di Provinsi DKI Jakarta.



16 Desember 2025

JP- Mirai

MoU ini meliputi pelaksanaan bersama pelatihan, kualifikasi, dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

MoU & Join Statement Kadin Indonesia

Desember 2025-Januari 2026



15 Januari 2026
Pemerintah Ehime Jepang

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dibidang Ekonomi antara Indonesia dengan Pemerintah Ehime Jepang



19 Januari 2026
**Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD)**

MoU mengenai komitmen untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan berkelanjutan



20 Januari 2026
British Chamber (Britcham)

Join Statement mengenai peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi.



28 Januari 2026
**PT. Bank Syariah Indonesia
(Persero) Tbk.**

Kemitraan dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan syariah, serta pengembangan industri halal dan ekosistem pendukungnya.





Anggota Indian Chamber of Commerce Praveen Kapur memberikan cinderamata kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie dalam acara Gala Dinner yang bertajuk "Featuring the Launch of Industry Hubs & Indonesia Economic Outlook 2026" di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis malam (11/12/2025).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menilai kerja sama ekonomi Indonesia-India memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya dalam acara India – Indonesia Chamber of Commerce Jakarta Gala Dinner: Featuring the Launch of Industry Hubs & Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis malam (11/12/2025).

Anin mengungkapkan optimismenya terhadap peningkatan hubungan dagang kedua negara.

"Trade-nya dari 25 miliar dolar AS bisa naik ke 50 miliar dolar AS. Apalagi kalau kedua negara digabung, PDB-nya mencapai 5 triliun dolar AS," ujar Anin.

Anin juga menyoroti peran penting diaspora India yang telah lama tinggal dan beraktivitas di Indonesia. Menurut Anin, hubungan sosial yang terbangun secara natural memperkuat kolaborasi ekonomi kedua negara.

"Ini memberikan potensi besar untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan juga transfer ilmu," kata Anin.

Lebih lanjut, Anin menambahkan bahwa India memiliki kekuatan besar pada sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, serta energi terbarukan. Karena itu, kedekatan kedua negara menjadi peluang strategis untuk memperluas kerja sama.

"Teman-teman diaspora India di sini bisa menjadi ambassador India di Indonesia dan ambassador Indonesia ke India. Itulah 'cantik'-nya acara hari ini," ujar Anin.

Lebih jauh disampaikan Anin bahwa aspek ekonomi India yang bisa diadopsi Indonesia, salah satunya ialah kekuatan sektor swasta India patut dijadikan inspirasi.

“Ekonomi India banyak didorong oleh swasta. Tentu ada BUMN, tetapi dunia usahalah yang membuat kewirausahaan di India bergerak cepat,” jelas Anin.

Selain itu lanjut Anin, faktor penduduk yang besar serta tingginya konsumsi domestik turut mendukung pertumbuhan ekonomi India yang dinamis dan kompetitif.

Terkait kondisi global yang penuh ketidakpastian dan perang tarif yang memengaruhi rantai perdagangan internasional, Anin justru melihat peluang bagi Indonesia dan India untuk memperkuat posisi di kawasan Global South.

“Jika melihat BRICS, dua negara Global South yang punya kedekatan sejarah adalah India dan Indonesia. India tumbuh 7% dengan ekonomi 4 triliun dolar AS. Secara geografis pun kita dekat, hanya dipisahkan Lautan (Samudra) Hindia,” pungkas Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie (tujuh dari kiri) berfoto bersama jajaran pelaku usaha India dalam acara Gala Dinner India-Indonesia Chamber of Commerce Jakarta yang bertajuk “Featuring the Launch of Industry Hubs & Indonesia Economic Outlook 2026” di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis malam (11/12/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie berdiskusi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di sela-sela acara Gala Dinner India-Indonesia Chamber of Commerce Jakarta di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis malam (11/12/2025).





Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2026-2031 Nur Mustava (tiga dari kanan) berfoto bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa (empat dari kanan), Gubernur Kepri Ansar Ahmad (lima dari kanan), Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana (lima dari kiri), serta jajaran pengurus Kadin Kepri usai Musyawarah Provinsi V di Hotel Aston, Tanjungpinang, Sabtu (3/1/2026).

Tanjungpinang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) V di Hotel Aston, Tanjungpinang, Sabtu (3/1/2026).

Dalam Musprov tersebut, Nur Mustava resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri periode 2026–2031, menggantikan Akhmad Ma'ruf Maulana.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Kadin Indonesia Erwin Aksa, yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menilai transisi kepemimpinan ini sebagai langkah regenerasi yang positif bagi dunia usaha di Kepulauan Riau.

“Saya bersyukur bahwa Bapak Ma'ruf sudah mengawal Kadin Provinsi Kepri selama 10 tahun atau dua periode. Sekarang sudah ada generasi berikutnya, Pak Mustava, yang akan melanjutkan perjuangan Kadin di Kepri,” ujar Erwin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri terpilih Nur Mustava menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan serta memperkuat berbagai program strategis yang telah dijalankan oleh kepengurusan sebelumnya.

“Salah satu program yang akan terus kita dorong adalah BBK Murah (Batam, Bintan, Karimun Murah) karena manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.

Mustava menilai kondisi perekonomian Kepulauan Riau saat ini menunjukkan tren positif, terutama yang ditopang oleh Batam dan Bintan.

Di sektor penerbangan, ia juga menyinggung pesatnya perkembangan industri Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Batam, khususnya Batam Aero Technic milik Lion Group yang kini memiliki 29 lini dan melayani pesawat dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

“Ini membuktikan bahwa MRO di Batam tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi sudah mampu bersaing di tingkat ASEAN,” tutup Mustava.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri periode 2014-2019 dan 2020-2025 sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana dan Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad.

Kadin Kalteng Gelar Rapimprov 2025,

Luncurkan Program Mahasiswa Entrepreneur MATANG



Wakil Ketua Umum wilayah Kalimantan, Andi Yuslim Patawari (lima dari kiri) berfoto bersama dengan para pembicara dan peserta Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kalimantan Tengah 2025 dan Peluncuran Program Mahasiswa Entrepreneur Miliarder Huma Betang (MATANG) di Hotel Luwansa, Palangkaraya Kalimantan Tengah pada Senin-Selasa (22-23/12/2025).

Palangkaraya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 2025 yang dirangkai dengan peluncuran Program Mahasiswa Entrepreneur Miliarder Huma Betang (MATANG). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Provinsi Kalteng, pada 22-23 Desember 2025.

Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari, yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rapimprov adalah forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, Kadin, dan dunia usaha, sekaligus menyiapkan langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi.

Menurut Andi, program MATANG juga menjadi bagian dari upaya mencetak generasi pengusaha lokal yang tangguh dan berdaya saing.

“Program MATANG yang diluncurkan Kadin Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah konkret mencetak entrepreneur muda dan miliarder masa depan. Kadin Indonesia mendorong seluruh jajaran Kadin provinsi untuk menjaga semangat kolaborasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” terang Andi.

Lebih lanjut, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalteng Rahmat Nasution Hamka menekankan bahwa peran strategis Kadin sebagai mitra pemerintah dan wadah bagi para pengusaha dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

“Rapimprov ini merupakan forum penting untuk meningkatkan sinergi antara Kadin, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, agar program-program strategis, seperti pengembangan UMKM, agribisnis, kehutanan, dan pariwisata, dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung yang hadir mewakili Gubernur Provinsi Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Kadin memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi daerah ke depan melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

“Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menangkap berbagai peluang ekonomi,” katanya.

Dijelaskan Leonard bahwa Provinsi Kalteng memiliki potensi besar di berbagai sektor, sehingga Kadin diharapkan mampu membaca peluang serta berkontribusi nyata mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pelibatan generasi muda melalui Program Mahasiswa Entrepreneur MATANG ini sejalan dengan visi Gubernur Provinsi Kalteng untuk menciptakan wirausaha dan miliarder muda,” pungkasnya.

Kadin Aceh Bersama Kadin Indonesia dan CSM Malaysia Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir dan Longsor



Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh bersama Kadin Indonesia & Lembaga Swadaya Masyarakat Malaysia, Cancer Survivors Malaysia (CSM) saat menyalurkan Bantuan Kemanusiaan untuk wilayah Aceh yang terdampak Banjir dan Tanah Longsor pada Sabtu (03/01/2026).

Banda Aceh – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh bersama Kadin Indonesia serta lembaga swadaya masyarakat asal Malaysia, Cancer Survivors Malaysia (CSM), menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh, sepanjang masa tanggap darurat pascabencana akhir 2025.

Kadin Provinsi Aceh memfasilitasi penyaluran 17 ton bantuan kemanusiaan dari CSM Malaysia yang didistribusikan ke tiga wilayah terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, Sabtu (3/1/2026).

Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, antara lain beras, tepung, kecap, air mineral, mi instan, makanan kering, minyak goreng, sikat dan pasta gigi, susu bayi, mukena, jilbab, pakaian dalam wanita, kaus, tikar, hingga obat-obatan.

Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh, baik pada masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah peduli dalam penanggulangan kebencanaan di Aceh. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada CSM Malaysia yang telah ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah ini,” ujar Iqbal.

Koordinator Pendistribusian Bantuan Kadin Provinsi Aceh Khalid menjelaskan bahwa sejak bencana banjir bandang dan longsor melanda Aceh pada akhir November 2025, Kadin telah menyalurkan bantuan ke 18 kabupaten dan kota terdampak.

“Tahap pertama bantuan melalui donasi Kadin Hadir Untuk Sumatra disalurkan ke Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, kemudian tahap kedua ke Aceh Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tahap ketiga hari ini bersama CSM Malaysia, kami menyalurkan sembako sekitar 17 ton. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CSM,” jelas Khalid.

Presiden CSM Zuraini Kamal menyampaikan bahwa masyarakat Malaysia turut merasakan duka atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh.

“Kami rakyat Malaysia sangat bersedih dan turut berduka cita. Atas dasar kemanusiaan dan kasih sayang, kami menyampaikan sedikit bantuan untuk meringankan beban korban banjir, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan. Semoga bantuan ini dapat menghadirkan sedikit kegembiraan bagi para korban,” kata Zuraini.

Selain bantuan logistik, Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi Aceh juga menyalurkan dua unit mesin pemurnian air Compact Water Purifier DC-2000-UF kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Gedung Balai Saudagar Aceh, Banda Aceh, Rabu (7/1/2026).

Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Indonesia atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Aceh.

“Selain mesin pemurnian air ini, Kadin Indonesia bersama Kadin daerah telah menyalurkan berbagai bantuan tanggap darurat serta donasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Kadin Provinsi Aceh dan Asosiasi Peduli,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa yang turut bekerja sama dalam pendistribusian bantuan di lapangan.

Menurut Iqbal, keberadaan mesin pemurnian air tersebut sangat krusial mengingat keterbatasan akses air bersih di wilayah terdampak bencana.

“Dengan kondisi sumber air bersih yang sulit diperoleh, kami berharap peralatan pemurnian air ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” pungkasnya.

Kadin Jatim Dorong Revisi UU Kadin

demi Penguatan Organisasi hingga ke Daerah



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan (dua dari kiri) bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto (dua dari kanan) berfoto bersama saat kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kantor Kadin Jatim di Graha Kadin Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (19/12/2025).

Surabaya – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto menyatakan Kadin Provinsi Jatim bersama Kadin Kabupaten dan Kota mendukung penuh rencana perubahan Undang-Undang (UU) Kadin.

“Kami sepakat perubahan (UU Kadin) ini diperlukan dan siap terlibat aktif memberikan masukan sesuai kepentingan dunia usaha,” kata Adik saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan di Graha Kadin Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (19/12/2025).

Adik menilai Kadin saat ini sudah eksis, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi organisasi dan sistem, terutama di tingkat kabupaten dan kota yang kualitasnya masih beragam.

“UU Kadin ke depan harus mendorong penguatan kapasitas organisasi, pembinaan manajerial, serta pemerataan peran Kadin di daerah,” tambah Adik.

Secara filosofis dan sosiologis, Adik menekankan UU Kadin harus berpihak pada pemerataan kesempatan berusaha dan perlindungan dunia usaha nasional.

“Undang-undang ini harus memperkuat peran Kadin dalam advokasi dan perlindungan usaha dalam negeri, termasuk menghadapi persaingan global,” ujar Adik.

Adik juga menyoroti belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang strategi nasional pendidikan dan pelatihan vokasi. Meski secara normatif peran Kadin sudah jelas, di tingkat kabupaten dan kota keterlibatan Kadin masih lemah.

“Di atas kertas peran Kadin jelas, tapi di lapangan belum berjalan,” kata Adik.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengingatkan bahwa Kadin memiliki sejarah panjang sebagai representasi dunia usaha. Organisasi Kadin sendiri telah berdiri sejak 24 September 1968 dan diakui pemerintah pada 1973, jauh sebelum hadirnya UU Kadin.

“Undang-undang yang ada saat ini telah berusia lebih dari 38 tahun dan lahir dalam konteks politik serta ekonomi yang sangat berbeda dengan kondisi sekarang,” ujarnya.

Menurut Sturman, sejumlah regulasi lama tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang bergerak cepat, terutama dari aspek kepastian hukum, adaptasi terhadap globalisasi, transformasi digital di era revolusi 4.0 dan daya saing industri.

“Karena itu, perubahan UU Kadin menjadi mendesak agar selaras dengan praktik bisnis modern dan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat serta berkelanjutan,” terangnya.

Lebih lanjut, Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman, menegaskan komitmen Pemprov Jatim mendukung penuh upaya Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU perubahan UU Kadin. Ia menilai Kadin merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam investasi, perdagangan, hingga penguatan UMKM melalui program misi dagang yang rutin digelar.

“Dengan regulasi yang adaptif dan relevan, Kadin dapat semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.



Perkuat Sinergi Global, Kadin Provinsi Bali Terima Kunjungan Mahasiswa Hong Kong Polytechnic University

Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, Made Ariandi menerima Kunjungan Studi dari delegasi The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) pada Kamis (15/012026).

Denpasar – Dalam upaya memperluas jejaring akademik internasional dan memperkenalkan potensi ekonomi daerah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali Made Ariandi, menerima kunjungan studi dari delegasi The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) pada Kamis (15/012026).

Kunjungan yang melibatkan 17 mahasiswa dan 1 pendamping akademik ini, bertujuan untuk membedah ekosistem ekonomi Bali serta menjajaki peluang kolaborasi strategis di sektor vokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Made Ariandi memaparkan terkait bagaimana Bali berhasil bangkit setelah hantaman pandemi. Ia menekankan bahwa ekonomi Bali kini tidak lagi hanya bersandar pada “satu kaki” pariwisata saja.

”Kami sedang mengimplementasikan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang lebih tangguh dengan menyeimbangkan sektor pertanian, industri kreatif, dan digital nomad, di samping pariwisata budaya yang tetap menjadi tulang punggung,” ujar Made Ariandi.

Lebih lanjut, Kadin Provinsi Bali menjelaskan peran krusial organisasi sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Made Ariandi menggarisbawahi beberapa poin penting yaitu:

Advokasi Kebijakan: Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Bali berperan aktif memastikan regulasi daerah mendukung kemudahan investasi asing tanpa menggerus identitas lokal.

Standardisasi SDM: Untuk menghadapi persaingan global, Kadin terus mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

Digitalisasi UMKM: Mendorong pelaku usaha mikro untuk masuk ke ekosistem digital agar produk lokal Bali dapat menembus pasar internasional, termasuk pasar Hong Kong.

Fokus pada Pendidikan Vokasi dan SDM

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah potensi kerjasama di bidang pendidikan vokasi. Mengingat PolyU memiliki reputasi global dalam pendidikan praktis, Made Ariandi melihat peluang besar bagi Bali untuk melakukan knowledge sharing.

”Strategi pengembangan SDM kami berfokus pada link-and-match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi magang atau riset bersama mahasiswa Hong Kong untuk membawa perspektif baru ke industri kreatif kami,” tutup Made Ariandi.

“Kadin Kalsel Peduli” Salurkan Donasi untuk Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar



Kadin Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan Kemanusiaan tahap II melalui Program ‘Kadin kalsel Peduli’ yang ditujukan untuk masyarakat terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Rabu (14/01/2026).

Banjarbaru – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Program Kadin Kalsel Peduli. Penyaluran Donasi ditujukan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (14/01/2026) dengan menyasar tiga titik terdampak banjir, yakni Sungai Lulut Dalam RT 01 serta wilayah perbatasan Desa Gudang Tengah dan Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sebelumnya, bantuan juga diberikan kepada warga terdampak banjir di wilayah Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel, Minggu (11/01/2026).

Ketua Umum Kadin Provinsi Kalsel Shinta Laksmi Dewi, mengatakan bantuan berupa paket sembako ini merupakan bentuk kehadiran dunia usaha dalam situasi darurat kemanusiaan. Menurutnya, banjir yang kembali melanda Kalsel tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami ingin memastikan dunia usaha tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga hadir saat masyarakat menghadapi musibah,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat gotong royong dan solidaritas menjadi dasar gerakan Kadin Kalsel Peduli, terutama dalam merespons bencana banjir yang terjadi berulang kali di daerah tersebut.

Penyaluran bantuan melibatkan unsur pengurus Kadin, relawan, serta dukungan dari Borneo Rescue agar distribusi dapat menjangkau warga secara langsung di lokasi terdampak.

Selain dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Kalsel Shinta Laksmi Dewi, kegiatan di wilayah Sungai Pinang Lama turut dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, Komunikasi, dan Perekonomian Kadin Provinsi Kalsel, Edy Sudarmadi.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Provinsi Kalsel Muhammad Pazri, mengatakan bantuan ini merupakan aksi kemanusiaan dan bentuk empati, serta solidaritas dunia usaha terhadap warga terdampak.

“Banjir ini bukan semata persoalan alam, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Kehadiran kami di lapangan merupakan wujud tanggung jawab moral agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini,” ujar Pazri di sela-sela penyaluran bantuan di Sungai Lulut Dalam (14/01/2026).

Senada, Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Kalsel Nur Mahya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dunia usaha yang secara konsisten dijalankan Kadin. Menurutnya, dunia usaha tidak boleh berjarak dengan masyarakat, terutama dalam situasi bencana.

“Bantuan ini merupakan amanah dari anggota Kadin dan mitra dunia usaha yang kami salurkan langsung kepada masyarakat terdampak. Semoga dapat meringankan beban warga dan membantu memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi yang masih sulit,” ujarnya.

Bantuan sembako yang disalurkan dinilai sangat membantu, khususnya bagi keluarga yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok akibat banjir.

Melalui Program Kadin Kalsel Peduli, Kadin Provinsi Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta solidaritas dunia usaha dengan masyarakat Kalimantan Selatan.

Dalam penyaluran tersebut, Kadin Provinsi Kalsel mendistribusikan sebanyak 340 paket sembako dan 1 ton beras. Bantuan berasal dari sumbangan anggota Kadin Provinsi Kalsel, mitra dunia usaha, serta para donatur.

Kadin Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyaluran Bantuan Kemanusiaan pada warga yang terdampak Banjir di wilayah Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu (11/01/2026).



Kadin Hadirkan Hunian Layak bagi Penyintas, Huntap Pertama Pascabanjir Bandang di Sumbar Resmi Dibangun

Padang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Peletakan Batu Pertama Hunian Tetap (Huntap) Penyintas Banjir Bandang di Kampung Talang, Koto Tuo, Kelurahan Kapalo, Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumbar pada Kamis (29/01/2026).

Proyek ini merupakan salah satu Huntap pertama yang direalisasikan bagi korban bencana banjir dan banjir bandang di wilayah Sumbar.

Pembangunan yang berdiri di atas lahan 1.800 meter persegi ini merupakan peningkatan dari Hunian Sementara Sehat dan Layak (HUNSELA) yang sebelumnya ditempati warga Kaum Suku Tanjuang, penyintas banjir bandang di kawasan Pangka, Jembatan Batu Busuk.



Ketua Umum Kadin Provinsi Sumbar Buchari Bachter (delapan dari kanan) saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Hunian Tetap (Huntap) Penyintas Banjir Bandang di Kampung Talang, Koto Tuo, Kelurahan Kapalo, Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumbar pada Kamis (29/01/2026).

Ketua Umum Kadin Provinsi Sumbar Buchari Bachter, menyatakan bahwa pembangunan Huntap di Kampung Talang merupakan bentuk perhatian langsung Kadin terhadap daerah terdampak bencana di Indonesia.

Buchari menjelaskan bahwa proyek ini mengusung konsep kolaborasi antara Kadin Pemerintah Kota Padang, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, PT PLN (Persero), Yayasan Buddha Tzu Chi, PT Semen Padang dan Universitas Andalas, sekaligus mendorong keterlibatan pengusaha lokal agar perputaran ekonomi tetap hidup.

“Konstruksi Huntap menggunakan teknologi Sepa Block produksi PT Semen Padang. Teknologi ini memungkinkan pembangunan berlangsung cepat dengan target penyelesaian 30 hari dan menjadi proyek percontohan pertama di Sumatra.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama pemerintah kota Padang.

Fadly menyampaikan bahwa pemerintah kota Padang tengah menyiapkan pembangunan sekitar 543 unit Huntap di tiga lokasi berbeda. Ketiga lokasi tersebut ialah Balai Gadang dengan lahan seluas 2,6 hektare dan akan ditambah 2 hektare, sehingga total menjadi 4,9 hektare.

Kemudian daerah Lambung Bukit dengan luas lahan yang disiapkan kurang lebih 4,6 hektare. Terakhir, daerah Simpang Haru dengan luas lahan 5.000 meter persegi.

Secara keseluruhan, lahan seluas 11 hingga 12 hektare ini diproyeksikan mampu menampung 600-700 unit rumah.

“Ini adalah salah satu (pembangunan Huntap) yang pertama di Sumatra pascabencana. Kami berterima kasih kepada semua pihak, termasuk donatur yang ikut menyumbang,” pungkas Fadly.



KADIN INDONESIA

GLOBAL & DOMESTIC ECONOMIC OUTLOOK 2026

MENDORONG PERAN SWASTA DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI:
PRO-GROWTH, PRO-POOR, PRO-JOB & PRO-ENVIRONMENT

Welcome Remarks

Dr. Aviliani
Wakil Ketua Umum
Bidang Analis Mikro-Makro
Kadin Indonesia

Opening Speech

**Anindya Novyan Bakrie,
B.Sc., M.B.A.**
Ketua Umum Kadin Indonesia

Keynote Speech

Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan RI

Keynote Speech

Lili Yan Ing
Sekretaris Jendral Internasional
Economic Association

Panel Discussion

Enrico Tanuwijaya
Ketua Komite Tetap
Kajian Ekonomi Strategis

Prof. Telisa A. Faenty
Ketua Komite Tetap
Kajian Ekonomi Daerah

Dinna Prapto Raharja
Wakil Komite Tetap
Kajian Geopolitik & Gepekonomi

Josua Pardede
Wakil Komite Tetap
Kajian Global Spillover

Moderator

Prof. Dr. Hermanto Siregar
Ketua Komite Tetap Kajian
Kebijakan Publik

Launching Kadin Business Pulse

Mulya Amri
Direktur Eksekutif
Kadin Indonesia Institute

Kamis, 15 Januari 2026
13.30 - 16.00 WIB

RGE Lounge, Menara Kadin Indonesia

Scan QR to enter Zoom Workspace
or visit the link below
s.id/GlobalEconomicOutlook2026





Diskusi Publik :

MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia



PEMBICARA

Dr. Ir. Dadan Hindayana
Kepala Badan Gizi Nasional RI

Anindya Bakrie
Ketua Umum KADIN Indonesia

Nurhadi, S.Pd., M.H.
Anggota Komisi IX DPR RI

H. Alven Stony
Ketua Umum Gabungan Pengusaha
Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI)

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes.
Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu
UGM

**Rabu,
14 Januari
2026**

**14.00
17.00
WIB**

Menara KADIN Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12950

Narahubung : 0812-9700-5859 (KADIN) / 0812-2800-2959 (GAPEMBI)

NEWS LINE



ROSAN P. ROESLANI

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM



ANINDYA BAKRIE

KETUA UMUM KADIN

JELANG WORLD ECONOMIC FORUM 2026 "A SPIRIT OF DIALOGUE"

Senin | 12 Januari 2026

LIVE

15.30
wib



metrotvnews.com











































































































































































































































































































































ROAD TO



Event Organized by
D katadata

Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa

📅 13 Januari, 2026 | 🕒 10:00-13:00 WIB | 📍 Menara Kadin Indonesia, Jakarta



**Andi Amran
Sulaiman****

Menteri Pertanian RI



**Airlangga
Hartarto**

Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian RI



**Anindya Novyan
Bakrie**

Ketua Umum
Kadin Indonesia



**Supratman
Andi Agtas****

Menteri Hukum RI

*Khusus Undangan | **Pembicara dalam Konfirmasi



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Investasi Tumbuh
Hilirisasi Tangguh
Indonesia Maju

WORLD ECONOMIC FORUM

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) ANNUAL MEETING 2026

19-23 JANUARI 2026 | DAVOS-KLOSTERS, SWISS

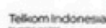
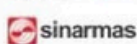
Why wait 134
the gender gap



ENDLESS HORIZONS WITH INDONESIA

INDONESIA PAVILION AT
THE WORLD ECONOMIC FORUM DAVOS

19-23 JANUARY 2026
PROMENADE 55
DAVOS, SWITZERLAND



SCAN FOR MORE DETAILS



<https://bit.ly/4jEMgrX>



**KADIN INDONESIA
INSTITUTE**



GALLUP CERTIFIED
Strengths Coach

KII *Executive* Brief

Gallup Survey: State of Global Workplace 2025



Narasumber :

Roma Tampubolon

CEO & Founders Strengths ID
(Partner Of Gallup Indonesia)

**JUMAT,
23 JANUARI
2026**

Pukul :
10.00-11.30 WIB

Tempat :
Ruang Mochtar Riady,
Menara Kadin Indonesia
Lt. 29, Kuningan, Jakarta
Selatan

Konfirmasi Kehadiran:

bit.ly/DaftarKIIExecutiveBrief

Khusus Anggota Kadin Indonesia





KADIN SHARIA ECONOMIC OUTLOOK 2026

DRIVING INDONESIA'S HALAL INDUSTRY COMPETITIVENESS
AND GLOBAL EXPORT READINESS

Menara Kadin Indonesia RGE Lounge Lt 29, Jakarta | Rabu 28 Januari 2026 | Pukul 08:30 - 12:30 WIB



AHMAD HAIKAL HASAN
Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal



ANINDYA NOVYAN BAKRIE
Ketua Umum Kadin Indonesia



TITI KHOIRIAH
Kepala Badan Pengembangan
Ekonomi dan Keuangan Syariah
(BPES) Kadin Indonesia



BIMA ARYA SUGIARTO
Wakil Menteri Dalam Negeri



**DYAH RORO ESTI
WIDYA PUTRI**
Wakil Menteri Perdagangan



NI LUH PUSPA
Wakil Menteri Pariwisata



**IRJEN POL
SONY SONJAYA**
Wakil Kepala Badan Gizi
Nasional Bidang Operasional
Pemenuhan Gizi



CECEP RUKENDI
Deputi Bidang Pengembangan
Strategis Ekonomi Kreatif
Kementerian Ekonomi Kreatif/
Badan Ekonomi Kreatif



DONNY PRAMONO
Founder Sour Sally Group



**BANJARAN SURYA
INDRASTOMO**
Chief Economist
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.



PRIMUS DORIMULU
CEO Investortrust/
Kepala Kantor Komunikasi
Kadin Indonesia



MUHAMMAD ISMAIL
CEO Zahir Internasional



RISQI WIDAYAT
Senior Vice President
SME PT Bank Syariah
Indonesia Tbk.

Layanan Dokumen Ekspor

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



- 1 Buka <https://trade.layanankadin.id/>
- 2 Log in atau Mendaftar Akun
- 3 Melengkapi Data-data perusahaan
- 4 Melakukan Pembayaran
- 5 Dokumen siap dicetak dan digunakan

Jenis Formulir COO

Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Prefential Tarif Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.

AYO KITA PAKAI ATA CARNET!

Apa itu ATA CARNET?

- Ata Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.
- Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai Pemberitahuan Pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.
- Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai "Paspor untuk Barang". Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

Siapa Penggunaanya?

Digunakan oleh Pebisnis, Teknisi, Penyelenggara pameran, Profesional, baik perorangan atau tim, Kru Film, Ahli Bedah, Arsitek, Seniman, Insinyur, Peneliti, Entertainer, Grup Musik, Tim Olahraga dll

Jenis-Jenis Barang

Penerapan ATA Carnet dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis;
2. Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli;
3. Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
4. Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga
5. Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

Masa berlaku ATA Carnet : 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang



Persyaratan Penerbitan

- Salinan (copy) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili
- Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili
- Salinan (copy) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin
- Salinan (copy) NPWP Perusahaan/Perorangan
- Salinan (copy) NIB Perusahaan
- Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang
- Rencana Perjalanan Barang
- Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal
- Menandatangani surat pernyataan bermaterai
- Meletakkan Jaminan



Kontak Pengajuan ATA Carnet

Email: atacarnet.idn@kadin.id atau atacarnetindonesia@gmail.com
Subjek email: "Pengajuan ATA Carnet" atau "Info ATA Carnet".

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
atacarnet.idn@kadin.id
atacarnetindonesia@gmail.com

AYO KITA PAKAI ATA CARNET!

Negara-negara yang menerbitkan dan menerima ATA Carnet untuk keperluan ekspor dan impor sementara :

- | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 21. Estonia | 41. Lebanon | 61. Qatar |
| 2. Amerika Serikat | 22. Finlandia | 42. Lithuania | 62. Republik Ceko |
| 3. Albania | 23. Filipina | 43. Luxemburg | 63. Rumania |
| 4. Algeria | 24. Gibraltar | 44. Makau | 64. Rusia |
| 5. Andorra | 25. Hongkong | 45. Madagaskar | 65. Selandia Baru |
| 6. Arab Saudi | 26. Hungaria | 46. Malaysia | 66. Senegal |
| 7. Australia | 27. India | 47. Malta | 67. Serbia |
| 8. Austria | 28. Indonesia | 48. Maroko | 68. Singapura |
| 9. Bahrain | 29. Inggris | 49. Mauritius | 69. Slovakia |
| 10. Belanda | 30. Iran | 50. Makedonia Utara | 70. Slovenia |
| 11. Belarus | 31. Irlandia | 51. Meksiko | 71. Spanyol |
| 12. Belgia | 32. Islandia | 52. Moldova | 72. Sri Lanka |
| 13. Bosnia Herzegovina | 33. Israel | 53. Mongolia | 73. Swedia |
| 14. Bulgaria | 34. Italia | 54. Montenegro | 74. Swiss |
| 15. Chili | 35. Jepang | 55. Norwegia | 75. Thailand |
| 16. China | 36. Jerman | 56. Pakistan | 76. Tunisia |
| 17. Côte d'Ivoire | 37. Kanada | 57. Perancis | 77. Turki |
| 18. Kroasia | 38. Kazakhstan | 58. Peru | 78. Ukraina |
| 19. Cyprus | 39. Korea | 59. Polandia | 79. Uni Emirat Arab |
| 20. Denmark | 40. Latvia | 60. Portugal | 80. Vietnam |
| | | | 81. Yunani |

Masa berlaku ATA Carnet : 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
atacarnet.idn@kadin.id
atacarnetindonesia@gmail.com



Kontak Pengajuan ATA Carnet

Email: atacarnet.idn@kadin.id atau atacarnetindonesia@gmail.com
Subjek email: "Pengajuan ATA Carnet" atau "Info ATA Carnet".



Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

<https://kadin.id/keanggotaan>



Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka anggota.kadinindonesia.id

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

3

Isi Data Perusahaan/ Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

6

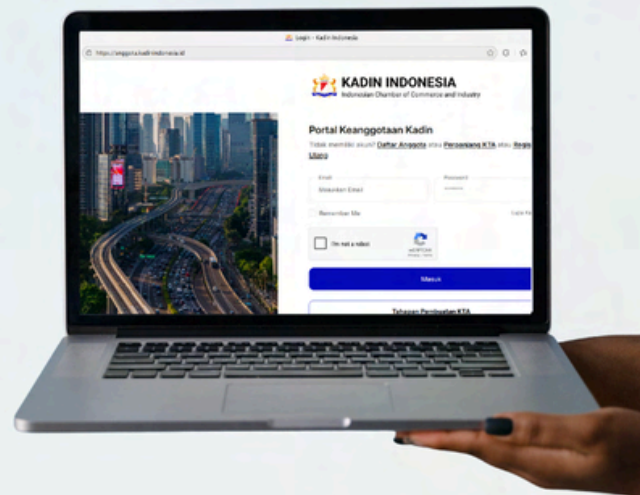
Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

7

Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



- KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda
- Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**
- Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin memenuhi **kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**
- KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**
- KTA dan SBU Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen
Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, HariwicaHYo Utomo, Fery Hasibuan, Luthfiah Ramadhani S

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id